

**STRATEGI PENGAWASAN INTERNAL
PENYALURAN PUPUK SUBSIDI DALAM RANGKA
TRANSPARANSI PROGRAM E-RDCK DI
KELURAHAN TANGKAHAN MEDAN LABUHAN**

SKRIPSI

Oleh :

NIRWANA

Npm : 1803100023

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Administrasi Pembangunan**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2022

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : NIRWANA
NPM : 1803100023
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Strategi Pengawasan Internal Penyaluran Pupuk Subsidi Dalam Rangka Transparansi Program E-Rdck Di Kelurahan Tangkahan Medan Labuhan

Medan, April 2022

PEMBIMBING

JEHAN RIDHO IZHARSYAH S.Sos., M.Si
NIDN. 0117019201

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI

ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP
NIDN. 0122118801



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP
NIDN. 0030017402


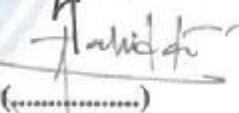

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **NIRWANA**
NPM : 1803100023
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari,tanggal : Jum'at , 8 April 2022
Waktu : 08.30 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **DEDI AMRIZAL S.Sos.,M.Si** 
PENGUJI II : **H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.** 
PENGUJI III : **JEHAN RIDHO IZHARSYAH S.Sos.,M.Si** 

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

 
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom



SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini Saya, Nirwana NPM 1803100023 menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang ,dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambi, karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil dari tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diajukan untuk memperoleh di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya uga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian terbukti saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian dan ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima

Medan 25 Maret 2022

Yang Menyatakan



Nirwana

NPM. 1803100023

Abstrak

Strategi Pengawasan Internal Penyaluran Pupuk Subsidi Dalam Rangka Transparansi Program E-Rdck Di Kelurahan Tangkahan Medan Labuhan

Nirwana

1803100023

Pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat pengawas yang berasal dari lembaga khusus pengawas yang dibentuk secara internal oleh Pemerintah atau lembaga Eksekutif. Kelompok Tani Nusajadi bekerjasama dengan Koperasi Unit Desa di Kelurahan Tangkahan dengan program E-rdck untuk mendata jumlah lahan pertanian yang dimiliki setiap petani. Dalam penyaluran pupuk subsidi kepada setiap petani melalui kelompok tani di lingkungan masing-masing yang sebagian sudah terdata melalui program pemerintah yang memiliki keterkaitannya dengan Dinas Pertanian Kota Medan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Strategi Pengawasan Internal Penyaluran Pupuk Subsidi Dalam Rangka Transparansi Program E-rdck Di Kelurahan Tangkahan Medan Labuhan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk Mengetahui Bagaimana Strategi Pengawasan Internal Penyaluran Pupuk Subsidi Dalam Rangka Transparansi Program E-rdck Di Kelurahan Tangkahan Medan Labuhan. Jenis Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Pendekatan Deskriptif dengan analisis Kualitatif. Teknik atau metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah Teknik Wawancara dan Wawancara In –depth interview (wawancara mendalam). Teknik anaisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Maka penulis menyimpulkan bahwa adanya Strategi Everfall dalam penginputan data dan Strategi Pengawasan Internal Penyaluran Pupuk Subsidi Dalam Rangka Transparansi Program E-rdck di Kelurahan Tangkahan Medan Labuhan sudah tercapai namun belum terlaksana dengan efektif.

Kata Kunci : Pengawasan Internal, Penyaluran, E-rdck, Transparansi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga para umat-Nya mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat. Adapun judul skripsi ini **“STRATEGI PENGAWASAN INTERNAL PENYALURAN PUPUK SUBSIDI DALAM RANGKA TRANSPARANSI PROGRAM E-RDCK DI KELURAHAN TANGKAHAN MEDAN LABUHAN”** guna untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum mencapai kata sempurna. Oleh karena itu penulis dengan besar hati dan dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan mahasiswa/I dan para pembaca sekalian.

Kemudian selama penyusunan skripsi ini penulis menyadari dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimah kasih kepada:

1. Yang paling utama yaitu Allah SWT yang selalu memberikan saya nikmat kesehatan, keselamatan, kedamaian diri dan juga kemudahan dalam menulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tanggung jawabnya.
2. Kedua orang tua, Ayahanda tersayang Suparwoto dan Ibunda tercinta Suriyawati serta tak lupa juga kepada Abangda Wukuf Wira Atmaza A.Md dan kepada adik-adik yang telah banyak memberi dukungan moral dan

materi serta doa restu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

3. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.sos, M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Abrar Adhani S.sos, M.ikom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Ananda Mahardika, S.sos, M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Jehan Ridho Izharsyah S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan merangkap juga selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan yang banyak dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak berjasa memberikan Ilmu selama proses perkuliahan
10. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang sudah banyak membantu penulis
11. Bapak Rahmat Dani selaku Ketua Kelompok Tani Nusajadi dan Narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini
12. Sahabat seperjuangan Yola Vania Putri Caesara dan Rina Rizki Amalia BR Munthe yang telah memberi dukungan penuh serta doa dan menaikkan mood untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian

13. Sahabat seperjuangan Lorong Ungu Anissa Agnes, Dian Kusuma Wardani dan Tiara Annisa yang selalu mendukung dan mendoakan serta memberi semangat untuk membantu menyelesaikan penelitian ini
14. Seluruh teman-teman sekelas Program Studi Ilmu Administrasi Publik terutama Konsentrasi Pembangunan yang telah memberi dukungan dan bersama-sama dalam menyelesaikan perkuliahan kita
15. Serta seluruh orang-orang yang namanya tidak dapat dituliskan satu persatu yang selalu mendoakan penulis dalam setiap langkahnya.

Akhirnya kata penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang membacanya. Kiranya Allah SWT membalas kebaikan dan dukungan serta bantuan yang di berikan semua pihak. Aamiin Yaa Rabbal Aalamiin.

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 2022
Penulis

Nirwana

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II URAIAN TEORITIS	7
2.1 Pengertian Pengawasan	7
2.1.1 Tujuan dan Dimensi Pengawasan Melekat	8
2.2.2 Jenis-Jenis Pengawasan.....	10
2.2 Transparansi	13
2.2.1 Manfaat Transparansi.....	15
2.2.2 Karakteristik Transparansi	16
2.3 Program E-rdck (rencana definitive kebutuhan kelompok Elektronik.....	16
2.4 Pupuk Subsidi.....	18
2.4.1 Jenis Pupuk Bersubsidi	20

2.4.2 Manfaat Pupuk Subsidi	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
3.1 Jenis Penelitian.....	22
3.2 Kerangka Konsep	23
3.3 Defenisi Konsep	23
3.4 Kategorisasi Penelitian	25
3.5 Informan dan Narasumber	25
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.7 Teknik Analisis Data	26
3.7.1 Analisis Swot	28
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Hasil Penelitian.....	30
4.1.1 Deskripsi Narasumber.....	30
4.1.2 Penyajian Data.....	32
4.1.3 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi Penelitian.....	33
4.2 Pembahasan.....	39
4.2.1 Analisis Hasil Wawancara	39
BAB V PENUTUP	46
5.1 Simpulan.....	46
5.2 Saran	47
DAFTAR PUSTAKA.....	31
DOKUMENTASI.....	49
LAMPIRAN-LAMPIRAN	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Mekanisme Penerbitan Kartu Tani	17
Gambar 2.1	Kerangka Konsep.....	23

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Keadaan Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.....	31
Tabel 4.2	Keadaan Narasumber Berdasarkan Usia	32
Tabel 4.3	Keadaan Narasumber Berdasarkan Pendidikan	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pernyataan

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi

Lampiran 4 SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing

Lampiran 5 SK-3 Permohonan Seminar Proposal

Lampiran 6 SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 7 Surat Keterangan Izin Penelitian

Lampiran 8 Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 9 SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lampiran 10 Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 12 SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Sebagai negara kepulauan dan memiliki wilayah yang luas, Indonesia adalah Negara yang dianugerahi oleh kekayaan alam yang tidak pernah ada habisnya. (Kementan, 2021) Dari keindahan alam untuk wisata hingga kekayaan alam yang bias diproduksi menjadi sumber energi tersendiri, salah satunya berasal dari sektor pertanian. Sejak dahulu, Indonesia selalu kaya dengan hasil dari pertanian seperti padi, kedelai, kacang tanah, ketela pohon dan ubi jalar. Selain itu, ada juga hasil dari pertanian yang disebut sebagai hasil pertanian tanaman perdagangan yaitu kopi, teh, kelapa, kina, dan yang lainnya. Pertanian Indonesia yang semakin hari semakin besar, hal ini memberikan dampak positif juga. Tidak hanya untuk urusan dalam negeri, tetapi juga luar negeri. Sektor pertanian Indonesia di mata dunia mendapat respon positif yang patut dibanggakan melalui klaim dari pemerintah kalau pertumbuhan sektor pertanian Indonesia menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Hal ini membuat sektor pertanian Indonesia di lirik oleh dunia Internasional.

(Badan Pusat Statistik, 2021, hal. 250) Sumatera Utara merupakan daerah agraris (pertanian) oleh karenanya prioritas pembangunan hingga saat ini tetap diletakkan pada sektor pertanian. Pembangunan ini ditunjukkan untuk meningkatkan pendapatan taraf hidup petani, melalui pertanian yang maju diharapkan makin menunjang pembangunan Nasional. Dari data pertanian ini

diawali dengan luas panen dan jumlah pertanian yang meliputi komoditi padi, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan yang diperoleh dari data Dinas Pertanian Kota Medan. Pertanian di Kota Medan terdapat beberapa Kecamatan yaitu salah satunya Kecamatan Medan Labuhan yang dimana Kecamatan ini memiliki luas wilayahnya 40,68 Km² Kecamatan Medan Labuhan merupakan daerah yang berdekatan dengan daerah pesisir (dekat dengan Belawan dan pesisir Deli Serdang), dengan penduduknya berjumlah 111.173 Jiwa dan luas pertanaman padi sawah di Kota Medan saat ini lebih kurang 1.997 hektar yang tersebar di 10 Kecamatan . Kecamatan Medan Labuhan ini banyak terdapt industri kecil seperti Produksi Perabot Rumah Tangga dari kayu. Disamping itu juga ada Pertanian dibidang tanaman Padi, kelapa gading di Kelurahan Tangkahan dan Kelurahan Nelayan Indah.(Badan Pusat Statistik, 2021, hal. 250)

Kecamatan Medan Labuhan adalah salah satu dari 21 kecamatan yang ada di Kota Medan dan merupakan daerah pemukiman penduduk, perkantoran, industri. Kecamatan Medan Labuhan merupakan kecamatan yang memiliki enam kelurahan yaitu : Kelurahan Pekan Labuhan, Si Mati, Besar, Martubung, Nelayan Indah, Tangkahan dan terdiri dari 99 lingkungan. Kelurahan Tangkahan terdiri atas 12 lingkungan, Kelurahan Tangkahan mempunyai jumlah kepala keluarga 6.993 dengan jumlah penduduk 26.345 jiwa dengan luas wilayah +600 Ha, dimana kelurahan tangkahan terletak di lingkungan 4, dengan jumlah kepala keluarga 500 dan jumlahjiwa 1.932. Kelurahan Tangkahan memiliki luas lahan pertanian lebih kurang 634 hektar dengan jumlah kelompok tani sebanyak 16 kelompok tani di masing-masing lingkungan ada satu kelompok tani dan koperasi

unit desa di Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan ini yang mendata lahan petani salah satunya yaitu Kelompok Tani Nusajadi di lingkungan 10 Kelurahan Tangkahan.

Kelompok Tani Nusajadi bekerjasama dengan Koperasi Unit Desa di Kelurahan Tangkahan dengan program E-rdck untuk mendata jumlah lahan pertanian yang dimiliki setiap petani untuk menerima pasokan pupuk subsidi dari pemerintah dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat biaya seperti yang dibahas dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan (UU RI No. 20 Tahun 2003, 1999). Dalam penyaluran pupuk subsidi kepada setiap petani melalui kelompok tani di lingkungan masing-masing yang sudah terdata melalui program pemerintah yang memiliki keterkaitannya dengan Dinas Pertanian Kota Medan. Program ini sudah terlaksana oleh setiap kelompok tani termasuk kelompok tani nusajadi di Kelurahan Tangkahan yang sudah menerapkan program E-rdck, yang dimana program ini berupa kartu tani yang nantinya sebagai akses untuk setiap petani saat menerima pupuk subsidi untuk lahan pertanian mereka pada saat dibutuhkan guna untuk memaksimalkan hasil padi saat panen tiba, jika petani tidak memiliki kartu tani maka petani harus melaporkan data berupa lahan pertanian sehingga kelompok tani nusajadi biasa mendata ulang petani melalui E-rdck untuk biasa mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan lahan pertanian.

Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan penyaluran semua jenis pupuk subsidi kurang efektif terlaksana di Kelurahan Tangkahan terkait dengan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan. Maka dari itu Pemerintah bekerja sama dengan Dinas Pertanian untuk bekerjasama dengan desa-desa maupun kelurahan di setiap daerah untuk mulai melakukan pengawasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani agar tepat sasaran sesuai data yang sudah diajukan oleh petani melalui program pemerintah yang ditujukan kepada setiap kelompok tani dan koperasi unit desa di kelurahan masing-masing untuk menerapkan program E-rdck untuk penyaluran pupuk bersubsidi dengan diketahuinya program tersebut oleh Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan untuk menerapkan program tersebut yang berupa kartu tani yang dimiliki setiap petani dengan kisaran lahan pertanian yang sudah didata oleh koperasi unit desa dan kelompok tani nusajadi. Sehingga setiap petani mendapatkan haknya untuk distribusi penerima pupuk bersubsidi melalui kebijakan pemerintah dengan harga yang jauh lebih terjangkau serta kualitas sudah terjamin, jadi biasa meringankan sedikit beban petani mengenai penyaluran pupuk bersubsidi maupun benih/bibit.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Pengawasan Internal Penyaluran Pupuk Subsidi Dalam Rangka Transparansi Program E-Rdck Di Kelurahan Tangkahan Medan Labuhan”**.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Strategi Pengawasan Internal Penyaluran

Pupuk Subsidi Dalam Rangka Transparansi Program E-rdck Di Kelurahan Tangkahan Medan Labuhan?"

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah untuk Mengetahui Bagaimana Strategi Pengawasan Internal Penyaluran Pupuk Subsidi Dalam Rangka Transparansi Program E-rdck Di Kelurahan Tangkahan Medan Labuhan.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dengan dilakukannya penelitian ini adalah :

- a) Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan kemampuan berpikir penulis melalui karya ilmiah.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam meningkatkan pengawasan distribusi penyaluran pupuk bersubsidi yang bekerjasama dengan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara bersama Kepala Kelurahan melalui Program E-rdck kepada Kelompok Tani Nusajadi dan Koperasi Unit Desa di Kelurahan Tangkahan.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan pelaksanaan program-program pemerintah khususnya kesejahteraan petani.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Dalam Penelitian Ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini yang akan diuraikan adalah Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Dalam Bab ini yang akan diuraikan adalah Pengawasan, Transparansi, Program E-rdtkk, Pupuk Subsidi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini yang akan diuraikan adalah Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Katagorisasi Penelitian, Informan atau Narasumber, Tenik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Waktu dan Lokasi Penelitian, Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini yang akan diuraikan adalah data penelitian yang diperoleh dari lapangan yang di analisis sehingga penelitian ini Dapat memberikan hasil pembahasan yang diberikan atas permasalahan yang diteliti

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini yang akan diuraikan adalah Memuat Simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari hasil penelitian

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. PENGERTIAN PENGAWASAN

Menurut Fahmi dalam Erlis Milta dkk (2015, hal. 653) pengawasan dapat di definisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Menurut (Putra, 2015, hal. 57) Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang harus dilakukan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana.

Menurut Daulay (2017, hal. 218) menyatakan bahwa pengawasan adalah usaha sistemik untuk menetapkan standard pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki perusahaan telah dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Definisi pengawasan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan merupakan proses unsur-unsur esensial.

Menurut (Dr.T. Hani Handoko, 2015, hal. 358) pengawasan (controlling) adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat positif maupun negatif. Pengawasan positif mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai dengan efisien dan efektif. Pengawasan negatif mencoba

untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak terjadi atau terjadi kembali.

Dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa Pengawasan adalah hal yang sangat penting dalam lingkup organisasi serta lembaga, yang bertujuan untuk memberikan hasil dalam sebuah pelaksanaan agar berjalan sesuai keinginana yaitu efisien dan berhasil secara efektif. Dan dalam lingkup masing-masing fungsi pimpinan sangat berhubungan erat dalam satu sama lain, yaitu: Merencanakan, mengorganisasikan, menyusun dan memberi perintah serta pengawasan. Semua ini merupakan sebuah prosedur yang sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan fungsi pengawasan, yang dimana fungsi pengawasan merupakan salah satu kunci yang menentukan berhasilnya sasaran atau tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

2.1.1. Tujuan Dan Dimensi Pengawasan Melekat

Menurut Situmorang dan Juhir dalam Oktaviana (2014, hal. 603) tujuan pengawasan melekat dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa agar tujuan dan sasaran kegiatan usaha unit-unit pemerintah dapat tercapai secara berdaya guna dan berhasil guna, dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, rencana atau program kerja, pembagian dan pendelegasian tugas, rumusan kerja, pedoman pelaksanaan dan peraturan undang-undang yang berlaku diunit-unit tersebut. Pengawasan yang melekat diadakan tidak bertujuan untuk menghambat jalannya organisasi atau hanya mencari kesalahan seseorang kemudian menjatuhkan sanksi, melainkan justru untuk memperlancar jalannya organisasi dengan melakukan tindak lanjut terhadap bawahan atau dengan menunaikan langkah-langkah

kepemimpinan sebaik-baiknya sehingga dapat diharapkan tujuan pengawasan melekat akan mempunyai makna positif dan dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Agar pengawasan dapat berjalan dengan baik ada beberapa dimensi-dimensi pengawasan yang perlu dipahami oleh pengawas. (Dr.T. Hani Handoko, 2015, hal. 360) mengatakan terdapat 5 dimensi pengawasan yaitu :

1. Penetapan standar hasil yang diinginkan
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
3. Pengukuran pelaksana kegiatan
4. Perbandingan pelaksanaan standar dan analisis penyimpangan
5. Pengambilan tindakan korektif bila diperlukan

Sedangkan Robbins dan Coulter (2016, hal. 13) terdiri dari empat dimensi yaitu :

1. Menetapkan standar (*Standards*) yakni penetapan patokan target atau hasil yang diinginkan untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan organisasi.
2. Pengukuran (*Measurement*) yakni proses yang berulang-ulang dilakuakn dan terus menerus, baik intensitasnya dalam bentuk pengukuran harian, mingguan, atau bulanan sehingga tampak yang diukur antara mutu dan jumlah hasil.
3. Membandingkan (*Compare*) adalah membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan standar.

4. Melakukan tindakan (*Action*) adalah keputusan mengambil tindakan koreksi-koreksi antara standar dengan realisasi perlu dilakuakn tindakan follow-up mengoreksi penyimpangan yang terjadi.

2.1.2. Jenis-Jenis Pengawasan

Adapun jenis-jenis pengawasan menurut Makmur (2011, hal. 67) dalam (Dr.T. Hani Handoko, 2015) dapat dibagi dalam:

1. Pengawasan Berdasarkan Objek
 - a. Pengawasan terhadap Penerimaan Negara
 - 1) Penerimaan dari Pajak dan Bea Cukai dilakukan oleh Kantor Inspeksi Bea dan Cukai.
 - 2) Penerimaan dari bukan Pajak dilakukan oleh KPKN.
 - b. Pengawawan terhadap Pengeluaran Negara.

Prinsip-prinsip yang dipakai dalam pelaksanaan pengeluaran negara adalah:

- 1) *Wetmatigheid*, pengawasan yang menekankan pada aspek kesesuaian antara praktik pelaksanaan APBN dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) *Rechmatighead*, pengawasan yang menekankan dari segi legalitas praktik APBN.
 - 3) *Doelmatighead*, pengawasan yang menekankan pada pentingnya peranan faktor tolok ukur dalam praktik pelaksanaan APBN.
2. Pengawasan Menurut Sifatnya.

a. Pengawasan preventif.

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya suatu kegiatan atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan. Tujuan pengawasan ini adalah :

- 1) Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan.
- 2) Memberikan pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif.
- 3) Menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.

b. Pengawasan Detektif

Pengawasan detektif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggung jawaban Bendaharawan. Berdasarkan cara melakukan pengawasan detektif dibedakan menjadi dua, yaitu :

- 1) Pengawasan dari jauh. Pengawasan dilakukan dengan cara meneliti laporan pertanggung jawaban Bendahawan, beserta bukti-bukti pendukungnya.
- 2) Pengawasan dari dekat. Pengawasan dilakukan di tempat diselenggaranya kegiatan administrasi.

3. Pengawasan Menurut Ruang Lingkupnya

a. Pengawasan Internal.

Pengawasan internal dibagi menjadi dua yaitu pengawasan dalam arti sempit, yaitu pengawasan internal yang dilakukan aparat yang berasal dari internal lingkungan Departemen atau Lembaga yang diawasi. Sedangkan pengawasan internal dalam arti luas adalah pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat pengawas yang berasal dari lembaga khusus pengawas yang dibentuk secara internal oleh Pemerintah atau lembaga Eksekutif.

b. Pengawasan Eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawas yang sama sekali berasal dari lingkungan organisasi eksekutif.

4. Pengawasan Menurut Metode Pengawasannya

a. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan atau atasan langsung suatu organisasi atau unit kerja terhadap bawahannya dengan tujuan untuk mengetahui atau menilai program kerja yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional, baik yang berasal dari internal Pemerintah, maupun dari lingkungan eksternal Pemerintah.

2.2. TRANSPARANSI

Menurut Mahmudi (2016, hal. 17) transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakannya. Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *good governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik.

Menurut Krina dalam Hanifah dan Praptoyo (2012, hal. 7) dalam (Yusuf, 2021) Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keyangan daerah. Menurut Krina dalam Hanifah dan Praptoyo (2015, hal. 7) mengatakan bahwa prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator berikut:

1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik.
2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik

3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani.

Menurut Surya Dharna (2010) Transparansi adalah suatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi di dalamnya, disertai dengan ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, dan bersifat bebas, jelas dan terbuka. Istilah Transparansi dalam sekolah adalah keadaan dimana semua orang yang terkait di dalamnya terhadap kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah. Transparansi haruslah jelas dan tanpa adanya sedikitpun suatu rekayasa yang dikerjakan oleh sekolah. Sekolah harus memberikan informasi yang benar adanya dan dapat dipercaya oleh publik.

Dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah kejelasan dalam data-data maupun informasi untuk menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang yang ingin mengetahui informasi guna untuk kolaborasi, kerjasama, dan bersifat bebas yang dapat diperoleh untuk mengetahui informasi terutama dilingkup pemerintahan yang harus transparansi dalam data-data yang akan diakses untuk semua masyarakat di zaman digital ini data tersebar luas dan sangat mudah diakses semua kalangan. Jadi, data yang bersifat terbuka maupun transparan sangat berdampak bagi masyarakat untuk mengetahui informasi yang jelas.

2.2.1. Manfaat Transparansi

Menurut Sri Minarti dalam Fierda (2015, hal. 29) manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekitar sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan transparansi adalah menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi, bentuk informasi yang dapat diakses oleh publik ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada publik.

Menurut Jamaludin (2015, hal. 6) beberapa manfaat yang didapat jika transparansi ini dilaksanakan, antara lain :

1. Menciptakan horizontal accountability antara pemerintah Desa dengan penduduk Desa dan pihak-pihak lain sehingga tercipta pemerintahan yang transparan, efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat Desa.
2. Menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa dalam mendukung pengambilan keputusan yang ekonomis untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Desa.
3. Membandingkan kinerja anggaran / penggunaan anggaran dan untuk menilai kondisi dana dengan hasil yang dicapai, sehingga berguna

untuk menyusun prioritas anggaran untuk mewujudkan program yang diprioritaskan.

4. Sebagai kontrol publik terhadap pemerintah Desa

2.2.2. Karakteristik Transparansi

Transparansi memiliki tiga karakteristik, Mardiasmo (2018, hal. 19) mengemukakan karakteristik tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Informatif. Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.
- b. Keterbukaan. Keterbukaan informasi publik memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.
- c. Pengungkapan. Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktifitas dan kinerja finansial.

2.3. PROGRAM E-rdck (rencana definitive kebutuhan kelompok-elektronik)

(Kementan, 2021, hal. 9) Program E-rdck dan Kartu Tani merupakan langkah kongret Kementerian pertanian (Kementan) dalam memperbaiki sistem penyaluran pupuk subsidi. Upaya lain yang optimalisasi alokasi pupuk bersubsidi yang tersedia di tiap-tiap Kabupaten dan Kota, serta mendorong distributor dan kios untuk mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi.

1. Kartu Tani berbasis E-rdck

Sebagai upaya menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, dan menindaklanjuti rekomendasi Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka diwilayah yang sudah siap infrastrukturnya, menggunakan kartu tani. Program Kartu Tani ini melibatkan beberapa instansi terkait yaitu: Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Gubernur dan Bupati/Wali Kota.

2. Penerbitan dan distribusi Kartu Tani

Dengan adanya Kartu Tani, petani menebus pupuk dengan membawa Kartu Tani ke kios resmi. Mekanisme penerbitan Kartu Tani yaitu sebagai berikut:



Gambar 1.1 : Mekanisme Penerbitan Kartu Tani

3. Penebusan Menggunakan Kartu Tani

Mekanisme penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani adalah sebagai berikut:

- a. Petani membawa kartu tani ke kios pengecer resmi

- b. Petugas kios menggesek Kartu Tani ke mesin EDC dan petani memasukan PIN sebagai dasar transaksi
- c. Apabila pada kartu tani terdapat saldo, kios akan memotong saldo secara langsung sesuai volume yang ditebus petani. Sedangkan apabila tidak ada saldo pada Kartu Tani, petugas kios akan menyetorkan dana tersebut pada rekening Kartu Tani selanjutnya digunakan untuk transaksi pupuk bersubsidi
- d. Apabila terjadi kendala saat transaksi petugas kios dapat menghubungi petugas Bank Pelaksana Kartu Tani di wilayah tersebut
- e. Dalam hal terjadi kendala transaksi petugas kios dapat mencatat penebusan pupuk bersubsidi tersebut dengan bukti print out transaksi error untuk selanjutnya dapat dikoordinasikan dengan Bank Pelaksana Kartu Tani untuk dilaporkan pada Tim Verval Kecamatan.

2.4. PUPUK SUBSIDI

Menurut (Darwis & Supriyati, 2016, hal. 46) berdasarkan sistem subsidi dan sumber pembiayaannya, sejarah kebijakan subsidi pupuk dapat dibagi ke dalam empat periode . Periode pertama, yaitu tahun 1970-1998, yang menerapkan sistem subsidi harga dengan sumber pembiayaan dari APBN. Selama periode tersebut, terdapat dua jenis subsidi yaitu:

- 1) Subsidi dari PLN dan pupuk impor (1970-1973)
- 2) Subsidi harga pupuk yang berasal dari impor dan produksi dalam negeri (1973-1998). Periode kedua, yaitu tahun 1999-2001, di mana sejak tahun

1998 subsidi harga pupuk dicabut karena harga non-subsidi terlalu mahal sebagai akibat dari menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada saat terjadinya krisis ekonomi. Pemerintah memberikan subsidi harga bahan baku (gas) untuk pembuatan pupuk berupa Insentif Gas Domestik (IGD) kepada perusahaan produsen pupuk dengan harga gas US\$ 1,3/MMBTU.

Pupuk adalah zat yang ditambahkan pada tumbuhan agar berkembang dengan baik. Pupuk dapat dibuat dari bahan organik ataupun non organik, dalam pemberian pupuk perlu diperhatikan kebutuhan tumbuhan tersebut. Agar Tumbuhan tidak mendapat terlalu banyak zat makanan, terlalu sedikit atau terlalu banyak zat makanan dapat berbahaya bagi pertumbuhan tanaman, pupuk dapat diberikan melalui tanah atau disemprotkan ke daun. Dalam arti luas yang dimaksud pupuk adalah suatu bahan yang digunakan untuk mengubah sifat fisik, kimia atau biologis tanah sehingga menjadi lebih baik bagi pertumbuhan tanaman. Sedangkan Pengertian yang khusus pupuk ialah Suatu bahan yang mengandung satu atau lebih Hara tanah.

Menurut pedoman pelaksanaan penyediaan pupuk bersubsidi Untuk sektor pertanian tahun 2012, pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. Pupuk mengandung bahan baku pertumbuhan dan perkembangan tanaman, cara suplemen seperti hormon tumbuhan membantu kelancaran proses metabolisme. Pupuk juga dapat diartikan sebagai bahan alami atau buatan yang mengandung unsur-unsur kimia yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan

produktivitas tanaman. Pupuk dapat meningkatkan kesuburan alami tanah atau mengganti unsur-unsur kimia yang sebelumnya diambil dari tanah. Dalam kandungan pupuk memiliki 1 atau lebih dari 3 unsur penting atau unsur primer dalam nutrisi tanaman yaitu nitrogen, fosfor, Kalium. Sedangkan unsur sekunder yaitu sulfur, magnesium dan kalsium.

Menurut (Darwis & Supriyati, 2016, hal. 48–60) berdasarkan sistem dan mekanisme distribusinya, sejarah kebijakan subsidi pupuk dapat dibagi menjadi tiga periode. Periode pertama, yaitu tahun 1970- 1978 di mana sistem distribusi menggunakan rayonisasi antara importir dan produsen (Badan Usaha Milik Negara/BUMN dan swasta). Satu provinsi/kabupaten dilayani oleh lebih dari satu importir/produsen. Selama periode ini, importir sekaligus bertindak sebagai distributor. Periode kedua, yaitu tahun 1979-2001, menggunakan sistem distribusi tunggal yaitu oleh PT Pupuk Sriwijaya (PT Pusri), yang menjadi penanggungjawab tunggal yang dilengkapi dengan sarana distribusi seperti kapal, unit pengantongan, gerbong kereta api, dan gudang. Sebagai distributor.

2.4.1. Jenis Pupuk Bersubsidi

Menurut (Darwis & Supriyati, 2016, hal. 49) Pupuk Bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik (Urea, ZA, SP-36 dan NPK) dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk yaitu PT. Pupuk Indonesia (Persero). Adapun Peruntukan Pupuk Bersubsidi yang diperuntukan bagi Petani yang telah bergabung dalam kelompok tani dan menyusun e-RDCK, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Petani yang melakukan usaha tani sub sector tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan/atau peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam; dan/atau
- b. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan pada Penambahan Areal Tanam Baru (PATB);

2.4.2. Manfaat Pupuk Subsidi

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan. Adapun Manfaat yang terdapat subsidi pupuk juga menjadi elemen yang begitu penting bagi produksi petani. Semakin bagus pupuk yang digunakan, maka hasil pertanian yang diperoleh akan semakin bagus pula. Pemerintah mulai memberikan subsidi harga pupuk sejak tahun 1971. Pemberian subsidi ini dimaksud untuk meningkatkan produksi beras yang dihasilkan oleh petani padi, disamping itu subsidi harga pupuk dimaksud juga untuk lebih efisien dalam transfer sumber daya pemerintah ke petani guna membantu pembangunan pedesaan/kelurahan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Adapun Jenis Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Pendekatan Deskriptif dengan analisis Kualitatif yaitu Prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan, keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada ditempat.

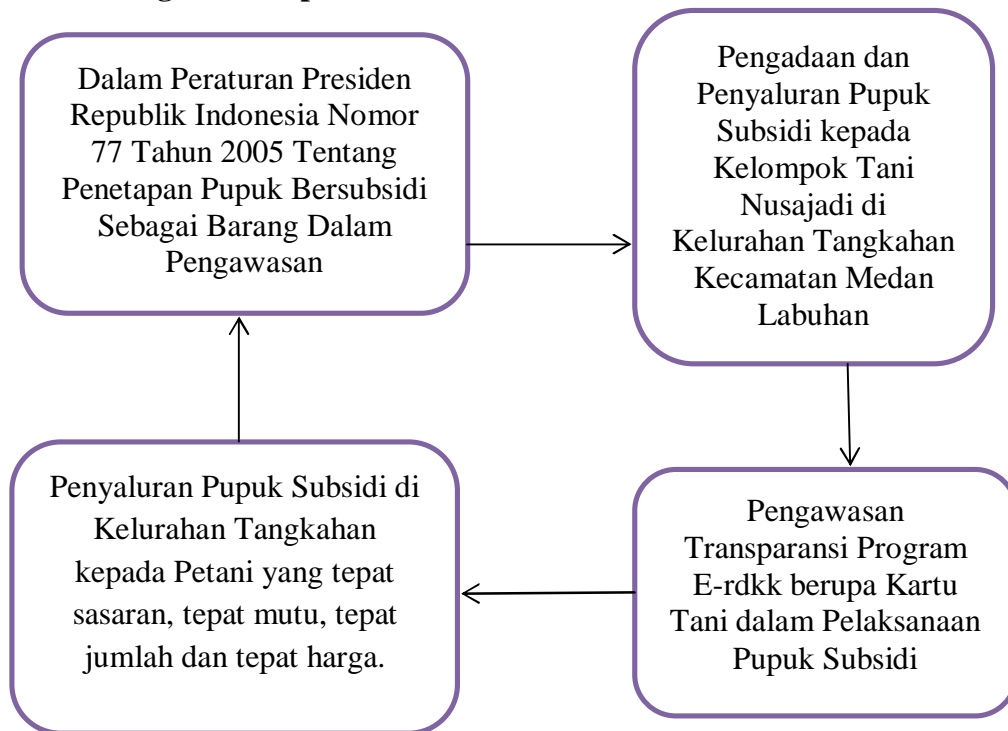
Menurut (Sugiyono, 2018, hal. 7–9) Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Menurut (Sugiyono, 2018, hal. 26–27) mengungkapkan dalam penelitian Deskriptif kualitatif, yang menjadi instrumennya adalah peneliti itu sendiri sehingga untuk dapat menjadi instrumen maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan.

Menurut (Sugiyono, 2018, hal. 86) Pendekatan Deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik

satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

3.2. Kerangka Konsep



Gambar 2.1. Kerangka Konsep

3.3. Defenisi Konsep

Adapun Konsep Pemikiran yang digunakan dalam Penelitian untuk mempersempit pembahasan yang akan diteliti adalah :

- a. Pengawasan adalah Proses kegiatan administrasi yang mempunyai tujuan untuk mengendalikan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan atau tidak. Karena itu bukan untuk dilihat siapa yang benar dan salah tetapi untuk mengkoreksi hasil kegiatan pekerjaan. Maka dengan demikian dari penyampaian-penyampaian langkah-langkah maupun prosedur yang tidak

terlaksana akan cepat mengambil tindakan agar terlaksana sesuai prosedur yang diinginkan.

- b. Pupuk Subsidi adalah pupuk yang dalam rangka penyaluran serta distribusi oleh pemerintah kepada petani yang terlaksana atas dasar program dari pemerintah
- c. E-rddk merupakan Suatu program yang berupa aplikasi yang digunakan kelompok tani dalam menyusun Rencana definitif Kebutuhan Kelompok (rddk) dengan pendampingan dari Penyuluh Pertanian di lokasi masing-masing. Program E-rddk ini berupa Kartu Tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh Perbankan kepada Petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin Electronic Data Capture (EDC).
- d. Transparansi adalah suatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi di dalamnya, disertai dengan ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, dan bersifat bebas, jelas dan terbuka.
- e. Tepat sasaran adalah data yang sudah diinput setiap masyarakat harus sesuai dengan pemberian barang/jasa yang tersedia.
- f. Tepat mutu adalah kualitas yang didapat sesuai keinginan yang diharapkan masyarakat terhadap pemerintah untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi.
- g. Tepat jumlah adalah sesuai dengan kebutuhan yang harus disediakan berdasarkan data yang ada.

- h. Tepat harga adalah harga yang diperoleh harus memenuhi standar yang sudah diterapkan pemerintah.

3.4. Kategorisasi Penelitian

Adapun yang menjadi Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- a) Adanya Pengawasan dalam penyaluran pupuk terhadap petani
- b) Adanya Transparansi data setiap Koperasi Unit Desa dengan kelompok tani dan petani
- c) Adanya standar dan penetapan target terhadap distribusi kartu tani
- d) Adanya tindakan Koreksi dalam program E-rdtk terhadap kelompok tani

3.5. Informan Dan Narasumber

Menurut Sugiyono (2010, hal. 300) Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono, “teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu” Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari beberapa informan masyarakat di Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan yang

berlangganan. Masing-masing informan menurut peneliti telah mewakili terhadap fokus penelitian. Peneliti mendapatkan informan dari lingkungan Kelompok Tani dan Petani dari hasil pencarian peneliti yang di bantu oleh beberapa teman.

Adapun Narasumber yang menjadi pertimbangan dalam penelitian ini adalah:

a. Kelompok Tani Nusajadi :

1. Ketua : Rahmad Dani
2. Sekretaris : Darwin
3. Kepala Keanggotaan : Hazrul Amri

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Esterberg dalam (Sugiyono, 2018, hal. 72) Teknik atau metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah Teknik Wawancara, wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Dalam hal ini pengguna menggunakan teknik wawancara in-depth interview.

Wawancara In –depth interview (wawancara mendalam) adalah adanya interaksi dengan cara tanya jawab dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, antara pewawancara dengan informan sambil tatap muka untuk memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian.

3.7. Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2018, hal. 335), yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

(Mujahiddin, 2018) Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan.

2. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2010, hal. 338). Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu.

3. Display Data

Menurut Amailes dan Huberman (Sugiyono, 2010, hal. 341) yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif. Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis. Data disajikan dalam

bentuk narasi berupa Strategi Pengawasan Internal Penyaluran Pupuk Subsidi Dalam Rangka Transparansi Program E-rdkk Di Kelurahan Tangkahan Medan Labuhan .

3.7.1. Analisis Swot

Data yang telah dikumpulkan, diolah dan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan alat analisis SWOT yang merupakan analisis kualitatif yang dilaksanakan dengan mengkaji faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal dalam hal ini adalah Strength (kekuatan atau potensi) dan Weakness (kelemahan atau kendala). Faktor eksternal terdiri dari Opportunity (peluang) dan Threat (ancaman). Analisis SWOT digunakan untuk memperoleh pandangan dasar mengenai Strategi Pengawasan Internal Penyaluran Pupuk Subsidi Dalam Rangka Transparansi Program E-rdkk di Kelurahan Tangkahan Medan Labuhan. (Lubis, 2020)

Menurut (Lubis, 2020) Rangkuti dalam Sugiyono (2009, hal. 28) kinerja perusahaan ataupun organisasi dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Analisis berupa faktor-faktor internal yang merupakan kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses). Kombinasi faktor internal dengan faktor eksternal yaitu:

1. Strategi SO (Strengths Opportunities)

Strategi SO merupakan strategi yang dibuat berdasarkan jalan pemikiran objek, yaitu dengan menggunakan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

2. Strategi ST (Strengths Threats)

Strategi ST merupakan strategi yang menggunakan kekuatan yang dimiliki objek untuk mengatasi ancaman.

3. Strategi WO (Weaknesses Opportunities)

Strategi WO ini ditetapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

4. Strategi WT (Weaknesses Threats)

Strategi WT didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan-kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

3.8. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dan lokasi penelitian untuk penelitian ini adalah Desember 2021-Maret 2022 Di Kelompok Tani Nusajadi dan Koperasi Unit Desa di Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuahan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah diperoleh melalui hasil penelitian di lapangan atau disebut dengan pendekatan kualitatif yaitu berupa data yang diperoleh dengan cara tanya jawab dan wawancara dengan narasumber sehingga memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh peneliti yang terdapat dilapangan melalui wawancara secara langsung dari beberapa informan di Kelompok Tani Nusajadi di Kelurahan Tangkahan terkait dengan Strategi Pengawasan Internal Penyaluran Pupuk Subsidi Dalam Rangka Transparansi Program E-rdtk Di Kelurahan Tangkahan Medan Labuhan.

Untuk mendukung perolehan data, selain wawancara maka terdapat wawancara mendalam untuk membantu menjelaskan hasil wawancara terutama terkait dengan tingkat karakteristik jawaban para narasumber. Selanjutnya hasil wawancara akan diuraikan secara sistematis berupa langkah-langkah sebagai berikut :

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dilapangan terhadap narasumber dapat dikelompokkan data-data yang berkaitan dengan jenis kelamin, umur, dan pekerjaan. Sehingga dapat memudahkan pendistribusian berdasarkan objek peneliti.

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis, sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Narasumber hanya dikelompokkan menjadi dua yaitu berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan presentase untuk masing-masing kategori yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1

Keadaan Narasumber Berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Laki-laki	3	100%
2	Perempuan	-	-
	Jumlah	3	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2022 di Kelompok Tani Nusajadi Kelurahan Tangkahan Medan Labuhan

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berjenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 3 orang dengan presentase 100% sedangkan Narasumber perempuan frekuensinya tidak ada atau nol.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Usia

Distribusi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi dua kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 30-40 tahun dan 50-60 tahun Pada tabel 4.2 dibawah ini akan dijelaskan frekuensi dan presentase masing-masing kategori umur yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.2
Keadaan Narasumber Berdasarkan Usia

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	35-38 tahun	1	30%
2	40-53 tahun	2	70%
	Jumlah	3	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2022 di Kelompok Tani Nusajadi Kelurahan Tangkahan Medan Labuhan

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa narasumber berumur 30-40 tahun dengan frekuensi 1 orang atau 30% sedangkan narasumber 50-60 tahun seimbang dengan frekuensi 2 atau 70% .

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.3
Keadaan Narasumber Berdasarkan Pendidikan

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	S1	2	60%
2	SMA	1	40%
	Jumlah	3	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2022 di Kelompok Tani Nusajadi Kelurahan Tangkahan Medan Labuhan

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber pendidikan S1 dengan frekuensi 2 orang atau 60% . Sedangkan narasumber dengan pendidikan SMA dengan frekuensi 1 orang atau 40% .

4.1.2 Penyajian Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dari narasumber, yaitu dengan Bapak Rahmad Dani selaku Ketua Kelompok Tani Nusajadi,

Bapak Darwin selaku Bendahara Kelompok Tani Nusajadi, Bapak Surya Girsah selaku Penyuluh Dinas Pertanian Kota Medan.

4.1.3 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan. Penelitian ini melakukan wawancara, melakukan observasi dan dokumentasi untuk mengetahui sejauh mana Strategi Pengawasan Internal Penyaluran Pupuk Subsidi Dalam Rangka Transparansi Program E-rdck di Kelurahan Tangkahan Medan Labuhan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama para narasumber/responden dilapangan, maka data dapat di analisis satu persatu tentang jawaban narasumber/responden sehingga dapat diperoleh rakapitulasi data sebagai berikut :

a. Adanya Pengawasan Dalam Penyaluran Pupuk terhadap Petani

(Harahap, n.d.) Pengawasan Penyaluran Pupuk terhadap Petani di Kota Medan Dilakukan oleh Komisi Pengawasan pupuk dan pestisida (KPPP) yang dibentuk oleh Walikota untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan, dan harga pupuk bersubsidi di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan oke KPPP masing-masing Kota yang di bantu oleh Penyuluh untuk mengawasi eceran pupuk di Kios yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan berjalannya suatu mekanisme penyaluran pupuk sesuai dengan kebutuhan petani yang sudah terdata dalam program E-rdck Di Dinas pertanian Kota Medan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Pada tanggal 15 Februari 2022 bersama Bapak Surya Girsah selaku Penyuluh Dinas Pertanian Kota Medan Khususnya Di Kecamatan Medan Labuhan, dengan pertanyaan tentang Apa saja kendala dalam penyaluran pupuk subsidi di Kelurahan tangkahan kecamatan Medan Labuhan, pertanyaan tentang Siapa saja yang terlibat dalam Pengawasan Internal yang harus dilaksanakan di Kelurahan Tangkahan, kemudian Kapan Pengawasan penyaluran pupuk subsidi di lakukan oleh kelurahan tangkahan, serta dimana dilakukan Pengawasan Penyaluran pupuk subsidi di Kelurahan Tangkahan, kemudian Bagaimana Strategi yang dilakukan dalam pengawasan penyaluran pupuk subsidi oleh kelompok tani nusajadi. Dari pertanyaan Apa saja kendala dalam penyaluran Pupuk Subsidi di Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan, beliau menjawab bahwa Kendala yang terjadi dalam penyaluran pupuk subsidi yaitu berupa penginputan data dalam program E-rdck yaitu berupa jaringan sehingga Penyuluh Dinas Pertanian memiliki Strategi berupa Pengawasan Everfall yang dimana pengawsan ini berupa situs Web yang dibuat oleh Penyuluh Dinas Pertanian setiap kecamatan yang prosesnya hanya diketahui oleh Penyuluh serta anggota Dinas Pertanian saja dan dari segi lapangan kendala yang terjadi berupa penebusan pupuk subsidi di Kios yaitu penebusan yang dilakukan oleh Keanggotaan Kelompok Tani Nusajadi sebagai penerima pupuk dipertama sebelum turun langsung ke petani yang sudah terdata di E-rdck. Yang dimana Penyaluran Pupuk subsidi juga

memiliki Batas Waktu penebusan yaitu 14 hari dari subsidi pupuk disalurkan oleh Dinas Pertanian ke Kios yang di tunjukan berdasarkan Data yang sudah diinput melalui program E-rdck untuk Kelompok Tani Nusajadi penyaluran Pupuk Subsidi dilakukan di Kios Pupuk Ginting di Kelurahan Tangkahan. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam Pengawasan Internal Penyaluran Pupuk Subsidi yang dilakukan di Kelurahan Tangkahan Yaitu pertama melalui Penyuluh Dinas Pertanian Kota Medan kepada Kelompok Tani Nusajadi berlanjut ke Kios Pupuk Ginting serta ke masing-masing anggota Petani di kelompok tani nusajadi, serta dalam pengawasan internal ini Lurah di Kelurahan Tangkahan tidak ikut serta dalam penyaluran pupuk subsidi kepada masyarakat yang memiliki lahan pertanian di kelurahan tangkahan. Pengawasan internal ini berlangsung di Kios Pupuk Ginting untuk pengambilan pupuk subsidi yang sudah terdata Program E-rdck, adapun Strategi yang dilakukan untuk Pengawasan penyaluran pupuk subsidi oleh Kelompok Tani yaitu berupa penunjukan kartu tani sebelum melakukan pengambilan pupuk di kios maupun di kelompok tani langsung serta melakukan pengecekan ulang jika ada data yang belum terinput di dinas tetapi sudah melakukan pengambilan pupuk subsidi.

b. Adanya Transparansi data setiap Koperasi Unit Desa dengan kelompok tani dan petani

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Pada tanggal 15 Februari 2022 bersama Bapak Surya Girsah selaku Peyuluh Dinas

Pertanian Kota Medan Khususnya Di Kecamatan Medan Labuhan, beliau mengatakan bahwa Pertanian di Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan sudah tidak menggunakan Koperasi Unit Desa sehingga data-data yang diperoleh khusus dari segi pertanian, data petani masuk langsung ke penyuluh serta ke Kelompok Tani Nusajadi untuk pendataan Program Pertanian yaitu Program E-rdck yang sudah berjalan dari awal diresmikan sampai saat ini, yang dimana program ini harus Transparansi agar tidak ada kecurangan atau penyalagunaan dalam proses pendataan untuk sektor pertanian yang ada di Kelurahan Tangkahan. Karena data yang di proses berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan pada saat Pembukaan lahan pertanian guna untuk mendata lahan petani yang membutuhkan pasokan pupuk subsidi dari pemerintah berupa pupuk subsidi ataupun benih bibit padi maupun sayuran/buah. Transparansi ini juga sangat penting dilakukan didalam sektor pertanian agar tidak terjadi kecurangan dalam proses penyaluran kebutuhan subsidi oleh pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan pasokan subsidi dilahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat yang sudah terdata di Kelompok tani Nusajadi melalui Program E-rdck di Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan.

c. Adanya standar dan penetapan target terhadap distribusi kartu tani

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Rahmad Dani selaku Ketua Kelompok Tani Nusajadi pada tanggal 10 februari 2022. Beliau mengatakan bahwasannya standar dan penetapan

target terhadap distribusi kartu tani berupa program E-rdkk yang dimana standar penetapan target dikelompok tani nusajadi berupa lahan pertanian yang dimiliki petani yaitu dibawah 1 hektar yang bisa mendata di program E-rdkk untuk mendapatkan pasokan pupuk bersubsidi dari pemerintah yang di proses selambat-lambatnya dalam waktu 2 bulan sudah bisa mendapatkan pasokan pupuk dari pemerintah untuk kebutuhan lahan pertanian yang ada dan sudah didata terlebih dahulu di kelompok tani dengan diawasain oleh peyuluh dinas pertanian kecamatan Medan Labuahan. Dalam program E-rdkk ini Petani Kelurahan Tangkahan hanya terdata kurang lebih 32 orang dari 60 petani yang datanya sudah masuk di kelompok tani nusajadi. Adapun beberapa kendala yang terjadi dalam penetapan target yaitu jumlah anggota petani yang memiliki lahan pertanian belum sepenuhnya terdata di program E-rdkk dikarenakan penginputan data yang selalu terkendala lambat oleh jaringan serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang memiliki lahan pertanian untuk menggunakan program E-rdkk berupa kartu tani yang jauh lebih mudah untuk penebusan pupuk subsidi dari pemerintah yang kualitas mutu serta harga yang jauh lebih terjangkau dari pupuk nonsubsidi.

d. Adanya tindakan Koreksi dalam program E-rdkk terhadap kelompok tani

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Darwin Selaku Bendahara Kelompok Tani Nusajadi di Kelurahan Tangkahan Medan Labuahan pada tanggal 15 februari 2022. Beliau mengatakan lahan

Pertanian di Kelurahan Tangkahan wajib melakukan tindakan koreksi dalam Program E-rdck agar tidak terjadi kecurangan dalam proses penyaluran pupuk subsidi kepada masyarakat yang memiliki lahan pertanian dan sudah terdata di program E-rdck yang dibuat oleh pemerintah, sehingga tidak terjadi pengoplosan pupuk subsidi yang berupa turunya tingkat kualitas pupuk dan naiknya harga pupuk subsidi dari harga normal yang diperoleh dari pemerintah dan ada beberapa oknum-oknum yang mengambil pupuk subsidi tidak sesuai lahan pertanian yang didata oleh kelompok tani tetapi melakukan pengambilan pupuk langsung ke kios penada pupuk sehingga banyak petani yang lahannya sudah terdaftar tidak menerima subsidi pupuk dari pemerintah. Adapun strategi koreksi yang dilakukan oleh kelompok tani nusajadi dalam program E-rdck untuk mengurangi kendala-kendala yang terjadi dilapangan dalam proses penyaluran pupuk subsidi dan kartu tani kepada masyarakat yang memiliki lahan pertanian dan sudah terdata di program pemerintah yaitu program E-rdck.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Surya Girsah selaku Penyuluh Dinas Pertanian Kota Medan di Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan pada tanggal 15 Februari 2022 menyatakan bahwa mengapa Tindakan Koreksi Program E-rdck terhadap Kelompok Tani Nusajadi perlu dilakukan. Karena dalam program ini masih banyak terjadi kendala internal maupun eksternal yang saat pendaftaran data keanggotaan untuk pasokan pupuk subsidi ini masih

banyak kendala yaitu dalam penginputan data yang dilakukan dalam situs web yang di buat oleh Dinas Pertanian masih sering eror walaupun sudah dibuat strategi oleh tiap-tiap penyuluh Kecamatan tetapi masih saja saat menggunakan web tersebut masih terganggu oleh jaringan bahkan web dalam program E-rdck ini lemah sehingga terhambat untuk petani-petani memasukkan data-data mereka berupa lahan, no KTP, No KK dalam proses persyaratan yang diperlukan untuk menerima pasokan pupuk subsidi untuk lahan para petani yang membutuhkan pasokan pupuk subsidi dari pemerintah yang dari segi kualitas sudah terjamin mutu serta harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan non subsidi lainnya. Tindakan koreksi ini dilakukan oleh Penyuluh Dinas Pertanian tidak memiliki waktu atau pun target dalam hal koreksi, tetapi setiap ada laporan yang masuk dilapangan yang dibuat surat utusan oleh sekretaris dan di ketahui oleh ketua Kelompok Tani Nusajadi bahwasannya terjadi kendala-kendala yang harus dilakukan tindakan atau membuat strategi ulang agar kendala yang terjadi dapat diselesaikan dengan cepat dan terstruktur.

4.2. Pembahasan

4.2.1 Analisis Hasil Wawancara

Pada sub bab ini, dari hasil penyajian data yang akan dianalisis dengan tetap mengacu kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan focus kajian dalam suatu penelitian. Dari seluruh data yang ada disajikan secara menyeluruh yang dapat diperoleh selama penelitian, baik dengan

melakukan wawancara kepada informan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab yakni tentang Strategi Pengawasan Internal Penyaluran Pupuk Subsidi Dalam Rangka Transparansi Program E-rdck Di Kelurahan Tangkahan Medan Labuhan. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan analisis berupa wawancara yang penulis lakukan.

a. Adanya Pengawasan dalam penyaluran pupuk terhadap petani

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan dalam penyaluran pupuk subsidi di Kelurahan Tangkahan medan labuhan belum efektif terlaksana dikarenakan banyaknya petani yang belum terdata dalam program E-rdck yaitu terkendala perihal pengaksesan data petani yang cukup sulit dilakukan, padahal tim penyuluh sudah melakukan strategi pengawasan tambahan yaitu berupa pengawasan everfall tetapi belum cukup membantu dalam pendataan sehingga banyaknya petani-petani di keanggotaan Kelompok Tani Nusajadi tidak mendapatkan haknya sebagai petani yang lahannya dibawah 1 hektar untuk memenuhi kebutuhan pupuk dan meningkatkan kualitas panen yang diinginkan oleh setiap petani dan dalam Pengawasan internal penyaluran pupuk subsidi ini kelurahan tidak ikut serta untuk masyarakatnya yang memiliki lahan pertanian, bahkan jika terjadi kendala dilapangan perihal pengukuran lahan pertanian lurah di kelurahan tangkahan tidak mengetahui kapan dilaksanakan proses pengukuran atau pendataan terhadap petani yang menerima pasokan pupuk subsidi sehingga semua

proses strategi pengawasan internal ini hanya dilakukan dan diketahui oleh Penyuluh serta Kelompok Tani Nusajadi saja dan petani di kelurahan tangkahan Medan Labuhan .

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Subsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan yang harus tepat sasaran, tepat mutu, tepat jumlah dan tepat harga. Di dalam Kelompok Tani Nusajadi di Kelurahan Tangkahan Medan Labuhan ini belum sepenuhnya terlaksana yang dimana terjadi beberapa kendala dalam strategi yang sudah dibuat untuk melakukan pengawasan internal yang tepat sasaran serta tepat mutu yang sudah terdapat dalam Peraturan Presiden mengenai barang pengawasan, penyaluran pupuk subsidi ini yang seharusnya diketahui Lurah dalam proses penyaluran pupuk kepada masyarakat yang memiliki lahan pertanian di kelurahan tangkahan agar tidak ada penyalagunaan kekuasaan untuk penerima pasokan pupuk subsidi dari pemerintah yang belum terpenuhi sepenuhnya dikarenakan banyak kendala yang terus terjadi dan tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu untuk Proses penyaluran subsidi pupuk dan kartu tani dalam program E-rdck.

b. Adanya Transparansi data setiap Koperasi Unit Desa dengan kelompok tani dan petani

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya data yang diolah seharusnya terdapat di Koperasi Unit desa terlebih dahulu baru data tersebut jika sudah terpenuhi diserahkan ke Kelompok tani

tetapi Di Kelurahan Tangkahan ini sudah lama tidak menggunakan koperasi unit desa lagi karena koperasi unit desa di kelurahan ini dibubarkan semenjak pemerintah mengutus penyuluh dinas untuk terjun langsung kelapangan untuk memproses data-data yang masuk langsung di dinas pertanian oleh Penyulu dinas pertanian yang ada di kecamatan untuk langsung memproses ke situs web yang sudah di sediakan oleh Dinas Pertanian Kota Medan sehingga data tidak bersifat rahasia atau data sudah transparansi kesemua pihak yang mengetahui data-data yang diperlukan untuk Program E-rdck yang dibuat oleh pemerintah untuk mempermudah para petani mengakses data-data mereka terlebih dahulu dalam hal penerimaan pasokan Pupuk subsidi.

Menurut (Napisah & Taufiqurachman, 2020) Transparansi data yaitu memberikan informasi yang terbuka dan jujur pada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan sehingga transparansi data kelompok tani Nusajadi sudah transparansi dan ada keterbukaan untuk semua pihak yang sudah mengakses data berupa No ktp dan No KK bisa membuka Situs web yang berupa program E-rdck yang diresmikan oleh pemerintah.

c. Adanya standar dan penetapan target terhadap distribusi kartu tani

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan standar dan penetapan target distribusi kartu tani di Kelurahan Tangkahan Medan Labuhan belum sepenuhnya sesuai dengan standar dan target yang telah ditetapkan dikarenakan ada kendala terhadap kualitas, kuantitas serta waktu yang di perlukan dalam hal pendistribusian kartu tanai dalam Program E-rdtk yang dimana data-data yang masuk dan diterima oleh penyuluh melalui pengecekan web yang dilakukan oleh dinas pertanian masih terkendala sehingga target yang harus dicapai belum terpenuhi dari jumlah anggota yang memiliki lahan pertanian belum ada 100% yang berhasil dalam penginputan data untuk pasokan pupuk subsidi dari pemerintah.

Menurut (Dr.T. Hani Handoko, 2015, hal. 363) Standar penetapan pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Yang berupa tujuan, sasaran, kuota, target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar di dalam Kelompok Tani Nujadi hanya sebagian yang terpenuhi dari jumlah standar penetapan target keanggotaan yang datanya masuk di Kelompok tani dan diproses oleh Penyuluh untuk menerima pasokan pupuk subsidi yang pencairannya dilakukan dengan menunjukan Kartu tani yang sudah dimiliki oleh masing-masing petani

agar tidak terjadi kecurangan dalam hal pengadaan pupuk terhadap petani maupun kios .

d. Adanya tindakan Koreksi dalam program E-rdck terhadap kelompok tani

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya Kelompok Tani Nusajadi di Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan dalam Program E-rdck ini melakukan tindakan koreksi yang tidak ditentukan waktunya kapan, tetapi tindakan koreksi ini diperuntukkan pada saat ada kendala-kendala yang terjadi di lapangan seperti data-data yang belum terakses ataupun penyaluran pupuk subsidi terhambat dalam pendistribusiannya dan masih banyak beberapa kendala-kendala lain berupa eksternal dan internal. Awalnya tindakan koreksi ini dibuat dalam prosedur penyaluran pupuk yang dalam waktu 4 bulan sekali tetapi banyaknya keluhan masyarakat dalam hal pertanian berupa kurangnya pasokan pupuk subsidi yang diberikan tidak sesuai lahan serta pengambilan di Kios pupuk giting masih banyak oknum yang menyalagunakan wewenangnya jadi kelompok tani nusajadi bersama penyuluh dinas pertanian melakukan strategi pengambilan tindakan koreksi yang berupa laporan masuk yaitu berupa surat bahwasannya ada terjadi kendala dilapangan yang harus segera melakukan tinjauan agar tidak terhambat dalam penyaluran pupuk subsidi kepada petani-petani.

Menurut (Dr.T. Hani Handoko, 2015, hal. 363) Tindakan Koreksi harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk,

standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan, dengan adanya pendapat menurut para ahli diatas tindakan koreksi didalam program E-rdck ini sudah berjalan tetapi belum sepenuhnya karena dalam hal proses pengambilan tindakan harus mengikuti prosedur terlebih dahulu setelah itu baru bisa diproses langsung oleh peyuluh dinas pertanian untuk kecamatan medan labuhan, tidak bisa langsung melakukan membentuk strategi untuk dilapangan sehingga harus sedikit menunggu dalam hal penerimaan pasokan pupuk subsidi dari pemerintah yang diperuntukkan terhadap petani yang memiliki lahan pertanian di bawah 1 hektar untuk mendapatkan pasokan pupuk subsidi.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Adapun yang menjadi Simpulan dalam penelitian ini adalah :

- a) Barang Pengawasan berupa penyaluran pupuk subsidi dalam program E-rdck dikelompok tani nusajadi belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2005 Tentang penetapan pupuk subsidi sebagai barang dalam pengawasan yang tepat sasaran, tepat mutu, tepat jumlah serta tepat harga, dikarenakan banyak terjadi beberapa kendala dilapangan yaitu terhambatnya penginputan data walaupun sudah menggunakan strategi Everfall untuk mempermudah pengaksesan data-data yang akan diinput dalam program E-rdck untuk kartu tani dan subsidi pupuk dari pemerintah untuk petani yang lahannya dibawah 1 hektar atau 15 rante. Yang dimana pengawasan internal ini dilakukan di Kios khusus anggota kelompok tani nusajadi yang terdaftar di program E-rdck. Pengawasan internal penyaluran pupuk subsidi juga bekerjasama dengan KPPP setiap Kecamatan khususnya kecamatan Medan Labuhan.
- b) Dalam hal pendataan program E-rdck di Kelurahan Tangkahan Medan Labuhan ini sudah berjalan sepenuhnya walaupun sudah tidak menggukan koperasi unit desa lagi dikerana semua data-data yang masuk langsung diproses melalui web dan diawasin oleh peyuluh dinas serta kelompok tani nusajadi sehingga sudah transparansi data-data dan bisa dilihat serta diakses jika mengetahui persyaratan untuk program E-rdck yang berupa kartu tani dan pupuk subsidi.

- c) Standar dan Penetapan target terhadap distribusi kartu tani di Kelurahan Tangkahan sudah berjalan tetapi belum efektif dikarenakan dalam penetapan target serta standar masih banyak kendala-kendala dilapangan yaitu kurangnya sosialisasi serta dalam penginputan data masih terhambat oleh jaringan sehingga target keanggotaan tidak terpenuhi dalam hal penyaluran pupuk subsidi dan kartu tani
- d) Tindakan koreksi dalam program E-rdck terhadap kelompok tani Nusajadi belum terlaksana sepenuhnya di karenakan tindakan koreksi ini hanya dilakukan jika ada penyimpangan dilapangan yang terjadi saat pasokan pupuk subsidi tidak diterima sesuai data dan kuota yang terdaftar di Program E-rdck kelompok tani Nusajadi dan dalam strategi pengawasan internal ini tindakan koreksi belum memiliki target waktu yang ditentukan hanya saja menunggu utusan surat masuk yang berisi laporan kendala dilapangan.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran-saran yang dibutuhkan berdasarkan yang penulis alamin selama penelitian mengenai Strategi Pengawasan Internal Penyaluran Pupuk Subsidi dalam Rangka Transparansi Program E-rdck di Kelurahan Tangkahan Medan Labuhan yaitu sebagai berikut :

- a) Diharapkan dalam pengawasan internal penyaluran pupuk subsidi, Lurah Kelurahan Tangkahan ikut serta dalam strategi pengawasan yang dilakukan dilingkungan masyarakat untuk memperkuat strategi pengawasan internal tingkat kelurahan.
- b) Diharapkan penyuluh Dinas Pertanian lebih memperkuat tingkat pengawasan dalam pembuatan kartu tani melalui Program yang sudah dibuat pemerintah yaitu Program E-rdck. Agar lebih banyak lagi petani-petani yang lahan pertaniannya di bawah satu hektar mendapatkan subsidi pupuk dari

pemerintah untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian yang dimiliki petani-petani dalam penggunaan nutrisi pada tanaman.

- c) Diharapkan Dinas Pertanian Kota Medan melakukan pengecekan langsung ke Kios-kios yang menjadi tempat pengambilan pupuk oleh petani sehingga memperketat Pengawasan untuk distribusi penyaluran pupuk bersubsidi.
- d) Diharapkan Dinas Pertanian kota Medan lebih meningkatkan Strategi dalam melakukan Pengawasan untuk penyaluran kartu tani dan pupuk subsidi agar tidak ada lagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam proses penyaluran pupuk subsidi kepada petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2021). *Badan Pusat Statistik Kota Medan Tahun 2021*. 561.
- Darwis, V., & Supriyati, N. (2016). Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, dan Optimalisasi Pemanfaatannya. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 11(1), 45. <https://doi.org/10.21082/akp.v11n1.2013.45-60>
- Dr.T. Hani Handoko, M. B. . (2015). *MANAJEMEN* (kedua). BPFE-YOGYAKARTA.
- Harahap, R. (n.d.). *59PERWAL NO 6 TAHUN 2013.pdf*.
- Kementan, D. S. P. (2021). Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021. *Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi*, 1–69.
- Lubis, J. R. I. dan F. H. (2020). Government Strategies in Planning Mass Transportation Medan City. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(5), 402–414.
- Mujahiddin, A. M. dan. (2018). MODEL STRATEGI PEREMPUAN KEPALA RUMAH TANGGA MISKIN DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN KELUARGA. (Studi Kasus Pada Lima Perempuan Kepala Keluarga Miskin di Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang) Oleh. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1, 10–27.
- Napisah, L. S., & Taufiqurachman, C. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis)*, 6(2), 79–88. <https://doi.org/10.38204/jrak.v6i2.397>

- Putra, A. E. (2015). Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada Pt.Kereta Api (Persero) Divisi Regional Iii Sumatera Selatan. *jurnal Media Wahana Ekonomika*, 12(1), 54–67.
- Sugiyono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cetakan ke). ALFABETA,CV.
- UU RI No. 20 Tahun 2003. (1999). Presiden republik indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, 2003(1), 1–5.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAe_gQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo
- Yusuf, F. M. (2021). *DESA OMBULO TANGO KECAMATAN TOLANGOHULA*. 4(2). <https://doi.org/10.31314/jsap.4.2.77-88.2021>
- Hariandja, Marihot T.E.(2002).*Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta:Grasindo
- Syafiie.I.(2002). *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Edisi Revisi),Jakarta: Rineka Cipta
- Kotler, P.(2007). *Manajemen Pemasaran, Analisis Perencanaan, Pengendalian*.Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Marsaoly, K. M. S.(2016). *Pengaruh Pengawasan dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Maluku Utara*. JMS, 2 No. 2, 24–33
- Kansil, C.S.T.(1991). *Pokok-pokok Perintahan di Daerah*. Jakarta: PT.Melto Putra.

Wibowo,dkk.(2018). *Pertanian Digital*. Jakarta: Indocamp.

Kurniawan, R.(2017). *Dinamika Kebijakan Pupuk dan Ketahanan Pangan*. Jakarta: PT.Gramedia

Edhy, S.(2021). *Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Anggaran*. Jakarta: Direktorat Jendral prasarana dan Sarana pertanian kementerian pertanian republik Indonesia.

Dokumen resmi:

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang

Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020

Artikel dalam jurnal atau majalah:

Darwis, V., dan Supriyanti. (2014). Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, dan Optimalisasi Pemanfaatannya. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*. 11, 5-60.

Napisah, L.S., dan Taufiqurachman.C. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik dan Transparansi Di kabupaten Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. 6, 2.

Putra, E.K. (2015). Peranan pengawasan dalam meningkatkan efektifitas kerja karyawan PT.KERETA API (PERSERO) Divi regional III Sumatera Selatan. *Junal Media Wahara Ekonomika*.12(1). 54-67.

Tulisan/berita dalam koran (tanpa nama pengarang) :

<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/3538/tangkahan-tanggap-aktif-bersama-handaitaulan#:~:text=Kecamatan%20Medan%20Labuhan%20merupakan%20kecamatan,dan%20terdiri%20dari%2099%20lingkunganketahanan-pangan-nasional.html> (Diakses tanggal 26 desember 2021)

<https://pemkomedan.go.id/hal-medan-labuhan.html>(Diakses tanggal 26 desember 2021)

<https://uns.ac.id/id/uns-update/pentingnya-sdm-pertanian-untuk-mendukung-ketahanan-pangan-nasional.html> (Diakses 27 november 2021)

<https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/sector-pertanian-indonesia-di-mata-dunia> (Diakses tanggal 26 desember 2021)

Dokumentasi hasil Penelitian di lapangan



Sumber : Hasil wawancara dengan Bapak Surya Girsah penyuluh Dinas Pertanian dan Bendahara Kelompok Tani Nusajadi di Kelurahan Tangkahan Medan Labuhan



Sumber : Hasil wawancara dengan Bapak Dani Ketua Kelompok Tani Nusajadi di Kelurahan Tangkahan Medan Labuhan



Sumber : Dokumentasi Pupuk Subsidi Urea di Kios Ginting di Kelurahan Tangkahan Medan Labuhan

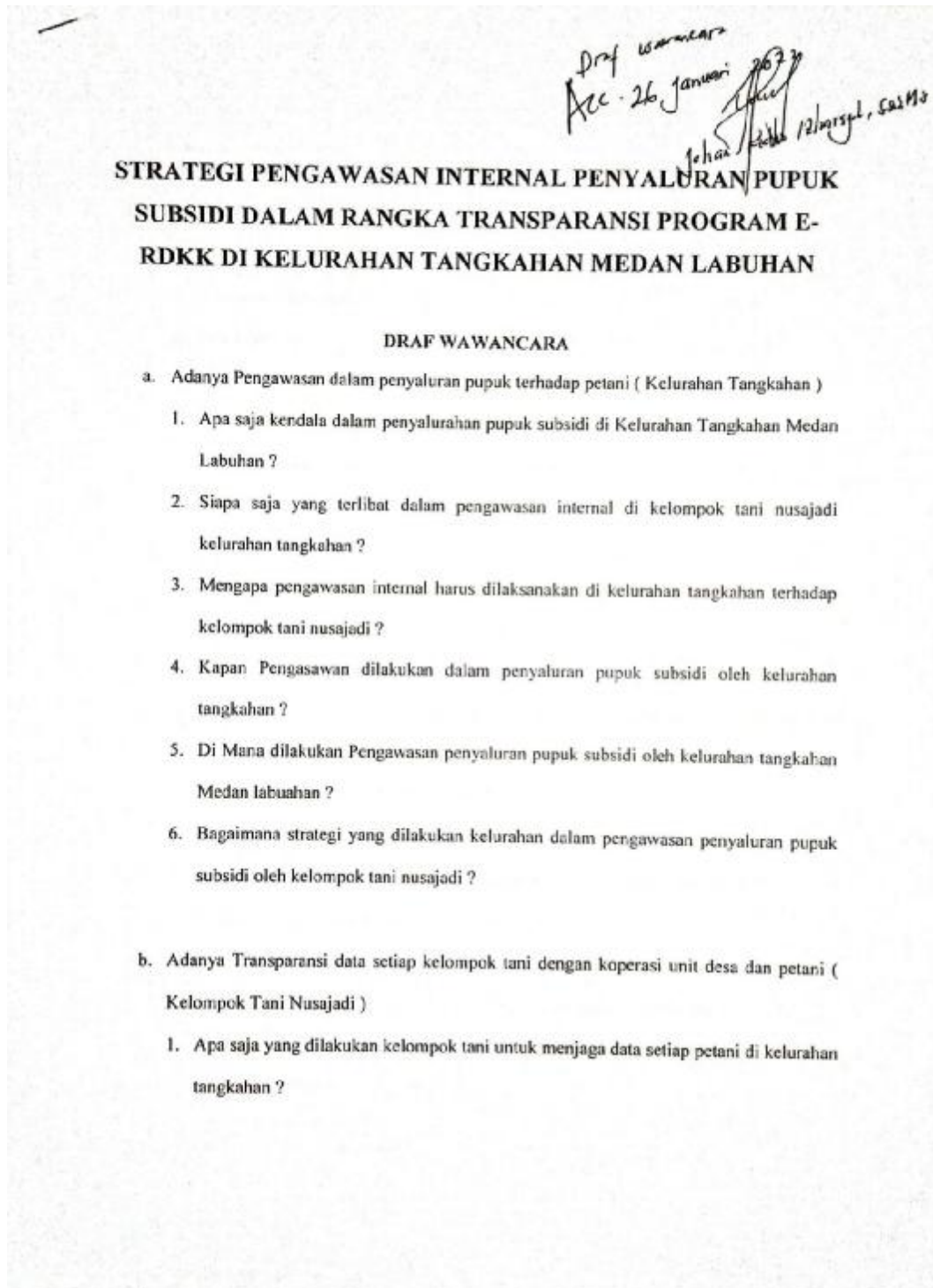


Sumber : Dokumtasi Pupuk Subsidi Phonska di Kios Ginting di Kelurahan Tangkahan Medan Labuhan



Sumber : Dokumtasi Pupuk Subsidi ZA di Kios Ginting di Kelurahan Tangkahan Medan Labuhan

LAMPIRAN-LAMPIRAN



2. Siapa saja yang terlibat dalam pengurusan data-data petani di kelompok tani nusajadi di kelurahan tangkahan ?
 3. Mengapa transparansi data harus dilakukan kelompok tani nusajadi kepada petani di kelurahan tangkahan ?
 4. Kapan pendataan dilakukan oleh kelompok tani nusajadi terhadap petani di Kelurahan tangkahan ?
 5. Di mana pendataan dilakukan kelompok tani kepada petani kelurahan tangkahan ?
 6. Bagaimana transparansi data harus dilakukan kelompok tani nusajadi oleh petani di Kelurahan tangkahan ?
- c. Adanya standar dan penetapan target terhadap distribusi kartu tani
1. Apa saja standar distribusi kartu tani di Kelompok tani nusajadi kelurahan tangkahan ?
 2. Siapa yang terlibat dalam standar dan penetapan target terhadap distribusi kartu tani ?
 3. Mengapa standar dan penetapan target terhadap distribusi kartu tani di lakukan kelompok tani terhadap petani di kelurahan tangkahan ?
 4. Kapan dilakukan distribusi kartu tani kelurahan tangkahan ?
 5. Di mana lokasi distribusi kartu tani harus dilakukan di kelurahan tangkahan ?
 6. Bagaimana Proses standar dan penetapan target terhadap distribusi kartu tani di kelompok tani nusajadi kelurahan tangkahan ?
- d. Adanya tindakan Koreksi dalam program E-rdck terhadap kelompok tani
1. Apa saja strategi tindakan Koreksi dalam program E-rdck terhadap kelompok tani nusajadi di kelurahan tangkahan ?

2. Siapa saja yang terlibat dalam koreksi program E-rdck terhadap kelompok tani nusajadi di kelurahan tangkahan ?
3. Mengapa tindakan Koreksi dalam program E-rdck terhadap kelompok tani nusajadi harus dilakukan oleh kelompok tani ?
4. Kapan tindakan Koreksi dalam program E-rdck terhadap kelompok tani nusajadi dan petani di Kelurahan tangkahan ?
5. Di mana program E-rdck dilaksanakan oleh kelompok tani nusajadi kelurahan tangkahan ?
6. Bagaimana koreksi yang dilakukan oleh kelompok tani nusajadi melalui program E-rdck ?



Jurnal KESKAP

Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik

SURAT KETERANGAN

No. 42/KET/KESKAP/III/2022

Dengan ini Redaktur Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Nirwana, Jehan Ridho Izharsyah
Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah menyerahkan naskah artikel untuk diproses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik:

Judul : Strategi Pengawasan Internal Penyaluran Pupuk Subsidi Dalam Rangka Transparansi Program E-Rdck Di Kelurahan Tangkahan Medan Labuhan
Jumlah Halaman : 10 Halaman
Penulis : Nirwana, Jehan Ridho Izharsyah

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 28 Maret 2022

Redaktur Jurnal KESKAP



Sigit Hardiyanto, S.Sos, M.I.Kom



PEMERINTAH KOTA MEDAN
KELOMPOK TANI NUSA JADI

Jln. Rawe VII Lingk X Kel. Tangkahan, Kec. Medan Labuhan, Kode Pos: 20525



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 08/03/2022

bertanda tangan dibawah ini Ketua Kelompok Tani Nusa Jadi, menerangkan bahwa

Nama : Nirwana

Npm : 1803100023

Universitas : Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Judul Penelitian : **Strategi Pengawasan internal Penyaluran Pupuk Subsidi Dalam Rangka Transparansi
Program E-Rdck Di Kelurahan Tangkahan Medan Labuhan**

nama diatas telah melakukan penelitian di Kelompok Tani Nusa Jadi Pada Tanggal 10 Februari 2022 s/d 18
2022. Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dengan seperlunya, terima

Medan, 23 Maret 2022





UMSU

Das | Terpercaya

pusat layanan dan penelitian
pemerintahan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224667 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

nomor : 138/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2022
inspirasi : --
: *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 24 Jumadil Akhir 1443 H
27 Januari 2022 M

pada Yth : Lurah Kelurahan Tangkahan
Kecamatan Medan Labuhan

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
salamu'alaikum Wr. Wb

iring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan
gala aktivitas yang telah direncanakan

tuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan
memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **NIRWANA**
IPM : 1803100023
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **STRATEGI PENGAWASAN INTERNAL PENYALURAN PUPUK
SUBSIDI DALAM RANGKA TRANSPARANSI PROGRAM E-
RDKK DIKELURAHAN TANGKAHAN MEDAN LABUHAN**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan
tima kasih. Nashrun minallah, wassalamu'alaikum wr. wb.

Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN: 0030017402



: File.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224587 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 https://fisp.umsu.ac.id fisp@umsu.ac.id unsumedan umumedan umumedan umumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI**

ada Yth.
 ak/Ibu
 na Program Studi Ilmu Administrasi Publik
 P UMSU

Medan, 27 November 2021

an.

Sami'alaikum wr. wb.

gan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
 tik UMSU :

Nama lengkap : Nirwana
 N P M : 1803100023
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Tabungan sks : 133 sks, IP Kumulatif 3,71...

gajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

Judul yang diusulkan	Persetujuan
Strategi Pengawasan Internal Penyaluran pupuk Subsidi dalam Rangka Transparansi program e-rask di Kelurahan Tangkahan - Medan Labuhan	Ace 27/11/2021
Efektivitas Program Penyaluran pupuk bagi petani di Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan	
Efektivitas SIM (Sistem Informasi Manajemen) dalam rangka sosialisasi Covid-19 di Kelurahan Tangkahan Medan Labuhan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

anda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
 Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan
 ta kasih. *Wassalam.*

Pemohon

mendasi Ketua Program Studi :
 uskan kepada Dekan untuk
 tapan Judul dan Pembimbing.

Nirwana

(Nirwana)

an, tgl. 27 November 2021

ps: Johan Ridho

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
 Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Annela Mahardika, S. Sos, M. Si
 N: 022110801

JOHAN RIDHO ZHARSYAH, S.Sos, M.Si
 NIDN: 0117049201



MSU

UAS | Terpercaya

Website: www.umsu.ac.id

Tel: 061-6622400

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id umsumedan umsamedan umsamedan umsumedan

Slk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 1449/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 27 November 2021, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **NIRWANA**
N P M : 1803100023
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **STRATEGI PENGAWASAN INTERNAL PENYALURAN PUPUK
SUBSIDI DALAM RANGKA TRANSPARANSI PROGRAM E-RDCK
DIKELURAHAN TANGKAHAN MEDAN LABUHAN**
Pembimbing : **JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 010.18.0310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 27 November 2022.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 29 Rabiul Akhir 1443 H
04 Desember 2021 M



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6324567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6325474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektu@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 07 JANUARI 2022

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : NIRWANA
 N P M : 1803100023
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / ADM PEMBANGUNAN

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 1231/SK/II.3/UMSU-03/P/20.21. tanggal 24 Desember 2021 dengan judul sebagai berikut :

STRATEGI PENGAWASAN INTERNAL PENYALURAN PUPUK SUBSIDI
 DALAM RANGKA TRANSPARANSI PROGRAM E- RDEK
 DIKELURAHAN TANGKAHAN MEDAN LABUHAN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

JEFHAN RIZKI HANIKAH S. Sos j.m.st.

Pemohon,

Nirwana

(.....NIRWANA.....)



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 75/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 19 Januari 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB
Tempat : Online/Daring
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

No.	NAMA MAHASISWA	NUMER POKOK MAHASISWA	PERANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	SITI HALIZA WARDAN	1503100016	NALLI KHAIIRAH, S.I.P., M.Pd.	DESI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MESIN ANUNJANG DUKCAPIL MANDIRI DALAM RANGKA OPTIMALISASI BERBASIS DIGITAL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN
2	HADDAD ALYI LUBIS	1503100013	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA NO.11 TAHUN 2016 DALAM UPAYA PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI DESA PADANG BULAN
3	NIRMANA	1503100023	NALLI KHAIIRAH, S.I.P., M.Pd.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	STRATEGI PENGAWASAN INTERNAL PENYALURAN PUPUK SUBSIDSI DALAM RANGKA TRANSPARANSI PROGRAM E-RDCK DI KEKURAHAN TANGKAPAN MEDAN LABUHAN
4	HINA RIZKI AYALIA B: MUNTJE	1503100009	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	FUNGSI DIRECTING KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM SDGS (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) DI DESA TANI MAKNIUR, RENGAT BARAT
5	MUTIARA RIZKI HASIBJAN	1503100054	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG MANAJEMEN PERANGKAT DESA DI KANTOR KEPALA DESA BUNTU PANE

Medan, 14 Januari Akhir 1443 H

17 Januari 2022 M





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

MSU

Cerdas, Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 88/SK/BAN-PT/Akred/PT/08/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Tel: (061) 6622400 - 6622467 Fax: (061) 6625474 - 6631003

https://fkip.umsu.ac.id fkip@umsu.ac.id @umsuimedan #umsuimedan umsuimedan

SK-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Nirwana
 N P M : 1803100023
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Judul Skripsi : Strategi Pengawasan Internal Penyaluran Pupuk Subsidi dalam rangka transparansi Program E-RDKK di Kelurahan Tangrahan Medan Labuhan

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	23-12-2021	Bimbingan BAB I, ii, iii	
2.	5/01/2022	Bimbingan Revisi bab I, ii, iii	
3.	7/01/2022	Acc Proposal	
4.	19/01/2022	Revisi Hasil Sempro	
5.	25/03/2022	Bimbingan Draft Wawancara	
6.	26/03/2022	Acc Draft Wawancara	
7.	24/02/2022	Bimbingan BAB IV & V	
8.	15/03/2022	Bimbingan BAB IV & V serta Bimbingan Abstrak & kata Pengantar	
9.	25/03/2022	Acc skripsi & Artikel	

Medan, 25 Maret 2022

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing

(Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP
 NIDN 0030017402

(Ananda Mahardika, S.Sos.MSP
 NIDN 0122118801

(Jehan Rulho Rizharsyah S.Sos, M.Si
 NIDN 0117019201

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 491/JUND/II.3-AJU/UMSU-03/F/2022

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Jumat, 08 April 2022
 Waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai
 Tempat : Ruang 208-209 FISIP UMSU



No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	NIRWANA	1803100023	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	STRATEGI PENGAWASAN INTERNAL PENYALURAN PUPUK SUBSIDI DALAM RANGKA TRANSPARANSI PROGRAM E-RDK DI KELURAHAN TANGKAHAN MEDAN LEBUHAN
2	SITI HALIZA WARDAH	1803100016	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	EFEKTIVITAS SIBISA OLINE DALAM RANGKA OPTIMALISASI PELAYANAN BERBASIS DIGITAL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN
3	MUTIARA RIZKI HASIBUAN	1803100054	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG MANAJEMEN PERANGKAT DESA DI KANTOR KEPALA DESA BUNTU PANE
4	RINA RIZKI AMALIA Br. MUNTHER	1803100009	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	FUNGSI DIRECTING KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM SDGD (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) DI DESA TANI MAKIMUR RENGAT BARAT
5						

Notulis Sidano :

1.

Medan, 04 Remedhan 1443 H

06 April 2022 M

Ditandatangani oleh :



Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Panitia Ujian

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : NIRWANA
Tempat Tanggal Lahir : MEDAN, 21 SEPTEMBER 2000
NPM : 1803100023
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Warga Negara : INDONESIA
Alamat : JLN. RAWE VII LING X KEL.TANGKAHAN KEC. MEDAN
LABUHAN
Anak Ke : 2(DUA)

Data Orang Tua

Ayah : SUPARWOTO
Ibu : SURIYAWATI
Alamat : JLN. RAWE VII LING X KEL.TANGKAHAN KEC. MEDAN
LABUHAN

Pendidikan Formal

1. Tamatan SD NEGERI 064997 Tahun 2010/2011
 2. Tamatan SMP NEGERI 25 MEDAN Tahun 2013/2014
 3. Tamatan SMA NEGERI 9 MEDAN Tahun 2016/2017
 4. Terdaftar Sebagai Mahasiswa FISIP UMSU Program Studi Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Pembangunan Tahun 2018
- Demikian Riwayat Hidup Saya Pembuat Sebenarnya.

Medan, April 2022

Nirwana